

## **EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN**

**Fedhina Lathifah<sup>1</sup> dan Dani Ramdani<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan 12920

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan dengan pendekatan *Value for Money*, yaitu dengan pengukuran 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) di kota/kabupaten di Indonesia pada tahun 2017. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif pada pengukuran ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan *cost-effectiveness*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun 2017 ditinjau dari indikator ekonomi termasuk dalam kriteria sangat ekonomis; ditinjau dari indikator efisiensi termasuk dalam kriteria sangat efisien; ditinjau dari indikator efektivitas termasuk dalam kriteria efektif; ditinjau dari indikator *cost-effectiveness* termasuk dalam kriteria *cost-effective*.

Kata kunci: Evaluasi Kinerja, *Value for Money*, Dana Alokasi Khusus

### **Abstract**

This study aims to determine the performance of the management of the Special Allocation Fund – Physical for Education with a Value for Money approach, namely by measuring 3E (economic, efficiency, and effectiveness) in cities/regencies in Indonesia in 2017. The data collection method used is documentation. The data analysis technique used is quantitative descriptive analysis on economic, efficiency, effectiveness and costeffectiveness measurements. The results of the study indicate that the performance of the management of Special Allocation Fund–Physical for Education in 2017 in terms of economic indicators included in the criteria of very economical; in terms of the efficiency indicators included in the highly efficient criteria; in terms of the effectiveness indicators included in the effective criteria; in terms of cost effectiveness indicators included in the cost-effective criteria.

Keywords: Performance Evaluation, Value for Money, Special Allocation Fund

## PENDAHULUAN

Salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2024 adalah meningkatkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing itu adalah dengan melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar membentuk generasi penerus bangsa yang dapat bersaing dengan negara lain.

Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana pendidikan adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu jenis dari transfer ke daerah dan dana desa. Dana Alokasi Khusus ini berbentuk *specific-purpose grant* yang dikhususkan penggunaannya untuk pembangunan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik disebutkan bahwa tujuan

dialokasikannya DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk mendanai kegiatan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan urusan wajib daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Menurut sepengetahuan penulis, semenjak terjadi perubahan tata cara pengalokasian DAK Fisik belum pernah dilakukan evaluasi kinerja terhadap peangelolaan DAK Fisik. Selain itu, pada penelitian Bappenas (2011) terdapat permasalahan terkait dengan belum adanya pedoman pemantauan dan evaluasi DAK serta instrumen monitoring yang memadai belum memiliki pemecahannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pada pengelolaan DAK Fisik adalah dengan melakukan pendekatan *Value for Money*.

*Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berarti pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti

pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Dari ketiga elemen pokok *Value for Money* tersebut, beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup (Mardiasmo, 2009). Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan berarti bahwa semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan, tanpa diskriminasi atau hak istimewa bagi kelompok tertentu. Pemerataan atau kesetaraan berarti pemerintah harus menerapkan pemerataan pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan mengutamakan pelayanan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.

*Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Dengan adanya penilaian kinerja ini dapat membantu pemerintah dalam proses

pengambilan keputusan anggaran dan mengawasi kinerja anggaran.

Melihat pentingnya pengukuran kinerja dalam suatu kebijakan yang diambil pemerintah dan belum terdapatnya pedoman pemantauan serta evaluasi DAK dan instrumen monitoring yang memadai, serta belum pernah dilakukannya evaluasi kinerja terhadap pengelolaan DAK Fisik setelah terjadi perubahan tata cara pengalokasian, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian terkait dengan evaluasi kinerja dengan pendekatan *Value for Money* pada DAK Fisik Bidang Pendidikan di kota/kabupaten di Indonesia pada tahun 2017.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori ini menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Prinsipal akan membuat kontrak dengan pihak agen dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti

yang diinginkan oleh principal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan atau khususnya DAK. Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan (dalam hal ini DAK) yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

### **Teori Desentralisasi Fiskal**

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Morozov (2015) menyatakan bahwa desentralisasi dapat diartikan sebagai transfer fungsi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memiliki kewenangan administratif dan pendapatan untuk melakukan fungsi tersebut.

Menurut Mifda (2011), desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi dan menentukan belanja rutin dan investasi atau dengan kata lain pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggaran. Desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif terhadap tingkat otonomi daerah. Hasilnya bergantung sangat besar pada desain kebijakan desentralisasi fiskal yang akan diterapkan (Falleti, 2005).

### ***Intergovernmental Transfer***

Dalam beberapa literatur keuangan negara Shah (2007) dikenal dua bentuk dana transfer yaitu *general purpose grant* (bantuan umum) dan *specific purpose grant* (bantuan khusus). *General purpose*

*grant* merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa adanya syarat penggunaan tertentu atas dana tersebut.

*Special purpose grant* atau disebut juga *conditional grant* adalah dana yang penggunaannya spesifik telah ditetapkan/disyaratkan oleh pemerintah pusat untuk membiayai bidang tertentu sesuai dengan prioritas pemerintah pusat tetapi bidangnya merupakan kewenangan daerah otonom. Sedangkan dari sisi penentuan jumlah bantuan spesifik yang akan ditransfer ke daerah, *specific purpose grant* dapat dibagi menjadi dua jenis (Bergvall et al., 2006), yaitu; *Closed ended grant* dan *Open ended grant*.

### **Dana Alokasi Khusus**

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Postur DAK diubah pada tahun 2015, di mana DAK secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. DAK Fisik menggambarkan DAK seperti era sebelum perubahan postur tersebut, yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan DAK Non Fisik memiliki pengertian yang sama kecuali penggunaan dananya yang hanya ditujukan untuk mendanai kegiatan khusus yang tidak berbentuk fisik seperti tunjangan guru PNSD, tambahan penghasilan guru dan lain-lain.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Sedangkan sektor publik sendiri merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Menurut Mardiasmo (2009), Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi

pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 01 – Tentang Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Empat karakteristik kualitatif yang harus dimiliki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

### **Akuntansi Pertanggungjawaban**

Akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen dan Mowen (2007) adalah suatu alat fundamental untuk pengendalian manajemen yang didefinisikan dalam empat elemen penting yaitu: (1) pembagian tanggung jawab; (2) pembentukan ukuran kinerja dan *benchmarking*; (3) evaluasi kinerja; dan (4) pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan system akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan perusahaan yang mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat

pertanggungjawaban dengan menetapkan pendapatan dan biaya tertentu.

Akuntansi pertanggungjawaban sebenarnya timbul sebagai akibat adanya wewenang yang diberikan dan bagaimana mempertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan tertulis (Viyanti dan Tin, 2010). Informasi akuntansi pertanggungjawaban berguna dalam pengendalian manajemen. Hal tersebut dikarenakan akuntansi pertanggungjawaban menekankan pada hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan.

Pengendalian dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada masing-masing manajer untuk merencanakan pendapatan dan atau biaya. Selain itu, para manajer juga diberikan tanggung jawab untuk mengajukan informasi terkait realisasi pendapatan dan biaya yang berada di bawah pengendaliannya.

### ***Value for Money***

Menurut Mardiasmo (2009) pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan

publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

*Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pengukuran kinerja *Value for Money* merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berarti pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dari ketiga elemen pokok *Value for Money* tersebut, beberapa

pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup (Mardiasmo,2009).

### Kerangka Pemikiran

*Value for Money* yang merupakan alat untuk menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh tujuan yang diharapkan. Konsep *Value for Money* lebih dikenal dengan konsep 3E yaitu Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. *Value for Money* menjelaskan hubungan yang optimal antara biaya/sumber daya serta manfaat/hasil yang disampaikan melalui proses yang mengubah *input* melalui aktivitas kegiatan menjadi *output* yang diperlukan untuk memicu hasil (*outcome*) yang baik. Oleh karena itu untuk mengukur seberapa ekonomis, efisiensi dan efektivitasnya kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan digunakan pendekatan *Value for Money* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Mardiasmo (2009)

## **METODE PENELITIAN**

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan tersebut adalah data terkait *input*, *output* dan *outcome* DAK Fisik Bidang Pendidikan yang diterima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian diolah kembali oleh penulis. Selain penulis juga menggunakan data sekunder lain seperti data-data yang berupa dokumen, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan atau bentuk lain yang diperoleh selama masa penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi kepustakaan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2015).

Tahap sebelum lapangan merupakan tahap penjajakan lapangan. Ada lima langkah yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Memilih lapangan penelitian
3. Menjajaki dan menilai lapangan
4. Memilih dan memanfaatkan narasumber
5. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2015). Pada tahap ini, penulis menggunakan model Miles and Huberman yang menekankan analisis data pada tiga langkah, yaitu; (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Kesimpulan dan Verifikasi.

Dari data yang telah didapatkan, penulis akan melakukan tiga pengukuran yaitu pengukuran ekonomi, pengukuran efisiensi serta pengukuran efektivitas.

#### **1. Pengukuran Ekonomi**

Dalam penelitian ini, pengukuran ekonomi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Input* : dana anggaran yang digunakan

Nilai *Input* : dana realisasi yang digunakan

## 2. Pengukuran Efisiensi

Dalam penelitian ini, pengukuran efisiensi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Output* : Presentase pencapaian fisik

*Input* : Presentase anggaran yang digunakan untuk menghasilkan *output*

## 3. Pengukuran Efektivitas

Dalam penelitian ini, pengukuran efisiensi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Outcome* : tujuan atau target yang hendak dicapai

*Output* : hasil yang dicapai

Data sekunder terkait *input*, *output*, dan *outcome* yang diterima oleh penulis sudah teruji validitasnya karena data tersebut diterima dari disampaikan oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara formal kepada Kementerian Keuangan dimana data tersebut disampaikan dari pejabat Eselon II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disertai dengan tanda tangan dan cap basah kepada Eselon II Kementerian Keuangan.

## TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Temuan Penelitian

#### Pengukuran Ekonomi

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input* value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Ditemukan bahwa realisasi anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun 2017 hanya mencapai 136% dengan nilai output 98%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat ekonomis dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan. Selain itu, nilai output juga menunjukkan bahwa pemerintah bukannya ekonomis dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan tetapi

malah justru pemerintah belum optimal dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Setiap satuan pendidikan memiliki rasio ekonomi yang berbeda-beda. Apabila hanya memperhitungkan angka rasio ekonomi maka satuan pendidikan SMK merupakan satuan Pendidikan dengan tingkat pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan paling ekonomis. Satuan pendidikan SMK memiliki rasio ekonomi sebesar 167% dan dapat melakukan penghematan sebesar Rp542.753.947.972 dari anggaran semula yang sebesar Rp1.353.563.839.912.

Tetapi untuk pengukuran ekonomi masih perlu dilihat kembali capaian *output*nya. Capaian *output* satuan pendidikan SMK hanya mencapai 50%. Maka dari itu, perlu diragukan apakah satuan pendidikan SMK mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan lebih ekonomis dibandingkan dengan satuan pendidikan SMP yang memiliki capaian *output* hingga 100%.

Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua merupakan pengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan yang paling baik karena rasio ekonominya mencapai 14313% dimana Kabupaten Puncak Jaya

dapat menghemat anggaran sebesar Rp4.925.695.614 dari alokasi awalnya sebesar Rp4.959.345.614. Tetapi jika dilihat dari nilai *output* Kabupaten Puncak Jaya hanya memiliki capaian *output* sebesar 23%. Sehingga perlu dilihat kembali arti dari besarnya rasio ekonomi di Kabupaten Puncak Jaya.

Kabupaten Bangka Tengah adalah kabupaten dengan pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan paling ekonomis dari kota/kabupaten yang memiliki capaian *output* lebih besar atau sama dengan 100%. Kabupaten Bangka Tengah memiliki rasio ekonomi sebesar 5543% dengan penghematan sebesar Rp206.863.839.816 dari alokasi anggaran awalnya yang sebesar Rp210.664.396.880.

### **Pengukuran Efisiensi**

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* (keluaran) yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Semakin besar *output* yang dihasilkan disbanding dengan *input* yang digunakan, maka semakin besar tingkat efisiensi suatu organisasi.

Kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2017 mencapai angka 133% dalam ukuran efisiensi. Angka ini menunjukkan bahwa pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tahun 2017 sudah dilakukan secara efisien. Kesimpulan ini ditujukan pada hasil pengelolaan bersama oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Satuan pendidikan SMP, dilihat dari tabel diatas, merupakan satuan Pendidikan dengan pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan paling efisien. Satuan pendidikan SMP memiliki tingkat *input* sebesar 77% yang digunakan untuk menghasilkan 100% *output* sehingga rasio efisiensinya menjadi sebesar 130%. Satuan pendidikan SMK adalah satu-satunya satuan pendidikan yang tidak memiliki rasio ekonomi diatas 100%. Dilihat dari tingkat *input*nya yang mencapai 60%, satuan pendidikan SMK hanya bisa menghasilkan 50% *output*.

Kota/kabupaten penerima DAK dengan rasio efisiensi paling tinggi adalah Kabupaten Bangka Tengah di Provinsi Bangka Belitung. Untuk menghasilkan *output* sebesar 373%, Kabupaten Bangka Tengah ini hanya menggunakan *input* sebesar 2%. Hal ini mengakibatkan rasio

efisiensi Kabupaten Bangka Tengah mencapai 5541%. Kabupaten Puncak Jaya memiliki rasio efisiensi terbesar kedua setelah Kota Bangka Tengah. Kabupaten Puncak Jaya memiliki rasio efisiensi sebesar 3292% yang didapatkan dari pemakaian 1% *input* yang menghasilkan 23% *output*.

Dari data yang ada ditemukan bahwa terdapat 16 kota/kabupaten penerima DAK dengan rasio efisiensi 0%. Dari 16 kota/kabupaten tersebut terdapat empat kota memiliki tingkat *input* dan *output* sebesar 0%. Selain ditemukan kota/kabupaten dengan rasio efisiensi sebesar 0%, ditemukan juga kota/kabupaten yang tidak dapat dihitung rasio efisiensinya. Terdapat tiga kota/kabupaten dengan hasil seperti tersebut. Kota/kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Ketiga kabupaten ini tidak bisa dihitung rasio efisiensinya karena tingkat *input*nya yang 0% tetapi memiliki tingkat *output* yang lebih dari 0%. Kabupaten Mamberamo Tengah dapat menghasilkan 70% *output* tanpa mengeluarkan *input* dari DAK Fisik Bidang Pendidikan.

### **Pengukuran Efektivitas**

Efektivitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian hasil program atau kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor public dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tingkat efektivitas pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Indonesia termasuk ke dalam tingkat yang efektif. Dari target pembangunan 245.410.412 sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, telah dibangun 240.803.798 sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2017. Hal itu menyebabkan tingkat efektivitas pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi sebesar 98%. Angka ini adalah angka pengelolaan DAK Fisik yang dihitung dari pemerintah daerah se-Indonesia.

Satuan pendidikan SMP merupakan satu-satunya satuan pendidikan dengan rasio efektivitas mencapai 100%. Dari

target untuk membangun 114.101.648 sarana dan prasarana pendidikan, satuan Pendidikan SMP dapat merealisasikannya sebesar 114.097.225 sarana dan prasarana Pendidikan serta menjadi satuan pendidikan dengan rasio efektivitas yang paling besar yaitu 100%.

Satuan pendidikan SMK adalah satuan pendidikan dengan rasio efektivitas paling kecil, dimana dari target pembangunan 4.419 sarana dan prasarana pendidikan, satuan pendidikan SMK hanya dapat merealisasikannya sebesar 2.204 sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga rasio efektivitasnya hanya mencapai 50%.

Kabupaten Keerom di Provinsi Papua merupakan kota/kabupaten penerima DAK dengan pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan paling efektif. Hal ini dilihat dari rasio efektivitasnya yang mencapai 440%. Setelah Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua menjadi kota/kabupaten kedua yang memiliki rasio efektivitas paling besar. Rasio efektivitas Kabupaten Mamberamo Raya ini mencapai 373%.

### **Pengukuran *Cost-Effectiveness***

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena di satu pihak, mungkin pelaksanaan sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien tetapi *output* yang dihasilkan tidak sesuai target yang diharapkan. Sedangkan di pihak lain, sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuannya tetapi dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program tersebut dapat dikatakan *cost-effective*. Indikator *cost effectiveness* merupakan kombinasi antara indikator efisiensi dan efektivitas.

Pengelolaan DAK Fisik di Indonesia dapat dikatakan *cost-effective*. Hal tersebut dibuktikan dengan rasio efisiensi yang memiliki rasio efisiensi mencapai 133% dan rasio efektivitas yang mencapai 98%. Satuan pendidikan SMP merupakan satu-satunya satuan pendidikan yang *cost effective* dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya. Satuan Pendidikan SMP memiliki rasio efisiensi sebesar 130% dan rasio efektivitas sebesar 100%. Kedua besaran rasio tersebut memiliki angka paling besar apabila dibandingkan dengan satuan pendidikan yang lain.

Terdapat 261 kota/kabupaten penerima DAK yang telah *costeffective* dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya, sedangkan kota/kabupaten penerima DAK sisanya belum *cost effective* dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya. Apabila dilihat besarnya rasio efisiensi dan rasio efektivitasnya maka Kabupaten Keerom di Provinsi Papua merupakan kota/kabupaten penerima DAK dengan kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan paling *cost-effective* karena memiliki rasio efisiensi sebesar 1563% dan rasio efektivitas sebesar 440%.

### **Evaluasi Kinerja**

Dalam melakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan pengukuran *Value for Money*, perlu diperhatikan bahwa untuk menilai suatu program atau kegiatan berkinerja baik atau tidak maka semua indikator yang ada pada pengukuran *Value for Money* tersebut harus memiliki hasil yang baik. Pada indikator ekonomi berarti rasio ekonomi minimal harus memiliki kriteria “Ekonomis”, untuk indikator efisiensi harus memiliki rasio efisien yang minimal berkriterian “Efisien”. Untuk indikator efektivitas,

kriteria minimal yang dimiliki rasio efektivitasnya adalah “Efektif”, sedangkan untuk indikator *cost effectiveness* maka hasilnya pastilah harus *cost-effective*.

Evaluasi kinerja pada pengelolaan DAK Fisik di Indonesia dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan indikator ekonomi yang memiliki kriteria “Sangat Ekonomis”, indikator efisiensi yang memiliki kriteria “Sangat Efisien”, indikator Efektivitas yang memiliki kriteria “Efektif”, dan Indikator *Cost Effectiveness* yang disimpulkan *cost effective*.

Satuan pendidikan SMP merupakan satu-satunya satuan pendidikan yang berkinerja sangat baik dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya. Satuan pendidikan SMP memiliki indikator ekonomi yang memiliki kriteria “Sangat Ekonomis”, indikator efisiensi yang memiliki kriteria “Sangat Efisien”, indikator Efektivitas yang memiliki kriteria “Sangat Efektif”, dan Indikator *Cost-Effectiveness* yang disimpulkan *cost effective*.

## **Pembahasan**

### **Kinerja Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada Tahun 2017 Ditinjau dari Indikator Ekonomi**

Indikator ekonomi bertujuan untuk mengetahui kinerja kota/kabupaten penerima DAK dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan apakah dalam memperoleh dan mengelola sumber daya (*input*) yang dibutuhkan agar dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Berdasarkan hasil analisis data pengukuran ekonomi pada kota/kabupaten penerima DAK pada tahun 2017 dapat diketahui bahwa secara total, pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dapat dikatakan sangat ekonomis. Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebesar Rp6.443.612.217.537, dan dari alokasi tersebut yang terealisasi adalah sebesar Rp4.752.358,647.806. Hal ini menunjukkan terjadinya penghematan anggaran sebesar Rp1.691.253.569.731. dengan *output* yang hampir maksimal yaitu 98%.

Satuan pendidikan yang mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan paling ekonomis adalah satuan Pendidikan SMP. Walaupun rasio ekonomi satuan

pendidikan SMP lebih kecil dibandingkan dengan satuan pendidikan SD dan SMK tetapi apabila dilihat dari capaian *outputnya* yang mencapai 100% dapat disimpulkan bahwa dalam menghasilkan *outputnya* sebesar 100%, satuan pendidikan SMP dapat melakukan penghematan sebesar Rp365.259.542.370 atau 23% dari alokasi anggarannya semula.

Kota/kabupaten dengan tingkat pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan paling ekonomis, apabila hanya dilihat dari presentase realisasi anggaran dibandingkan dengan alokasi anggarannya adalah Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua dengan presentase 14313%. Dari alokasi anggaran sebesar Rp4.959.345.614, Kabupaten Puncak Jaya hanya memakai dana sebesar Rp34.650.000 sehingga penghematan dihitung sebesar Rp4.924.695.614. dengan capaian *output* mencapai 23%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Indonesia sudah dapat dikatakan ekonomis apabila hanya dilihat dari perbandingan realisasi anggaran dan alokasi anggaran yang diterima.

Untuk kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Kota/Kabupaten juga sudah dapat dibilang ekonomis karena presentase realisasi anggaran dan alokasi anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan semua kota/kabupaten penerima DAK kecuali Kota Tangerang dan Kabupaten Aceh Jaya yang bernilai 0%, berada diangka diatas 100%.

Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di kota/kabupaten di Indonesia sebagian besar berada pada kisaran 90% ke atas, Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar kota/kabupaten penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan di Indonesia memang benar-benar telah mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya dengan baik. Tetapi masih terdapat kota/kabupaten yang mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya dengan kurang optimal sehingga tidak bisa dipastikan apakah DAK Fisik Bidang Pendidikannya telah dikelola secara ekonomis ataupun belum dilakukan secara ekonomis.

### **Kinerja Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada Tahun 2017 Ditinjau dari Indikator Efisiensi**

Indikator efisiensi bertujuan untuk mengetahui kinerja kota/kabupaten penerima DAK dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan apakah dalam menggunakan sumber daya (*input*) yang tersedia sudah baik untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

Secara total kota/kabupaten penerima DAK dapat meminimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam hal ini anggaran yang digunakan hanya 73,75% dari anggaran yang dialokasikan, dengan keluaran yang dihasilkan mencapai 98%. Tetapi kesimpulan pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan ini belum tentu mencerminkan tingkat efisiensi pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di pemerintah daerah maupun di satuan pendidikan.

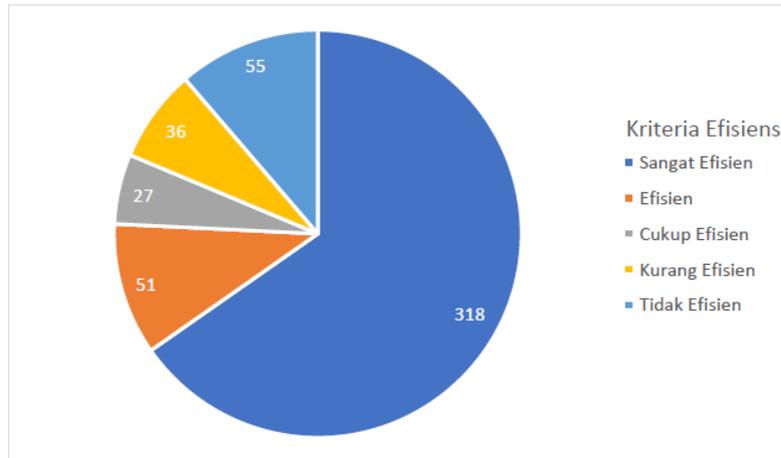
Satuan pendidikan SMP merupakan satuan pendidikan yang melakukannya dengan paling efisien. Dengan hanya menggunakan *input* sebesar 77%, satuan pendidikan SMP dapat menghasilkan 100% *output*. Karena itu, satuan pendidikan SMP ini termasuk dalam kategori kriteria “Sangat Efisien”.

Papua adalah provinsi dengan pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan paling efisien apabila dilihat dari rasio efisiensinya. Rasio efisiensi Provinsi Papua mencapai 330%, unggul jauh dibandingkan dengan Provinsi Bangka Belitung yang memiliki rasio efisiensi terbesar kedua, sebesar 124%.

Kabupaten Bangka Tengah di Provinsi Bangka Belitung merupakan daerah yang mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya dengan paling efisien. Dari nilai *input* yang hanya 2%, Untuk kota/kabupaten penerima DAK dengan tingkat pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang paling efisien setelah Kabupaten Bangka Tengah adalah Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dapat menghasilkan 23% *output* hanya dengan menggunakan 1% *input*.

Kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di kota/kabupaten penerima DAK pada tahun 2017 sudah dapat dikatakan efisien. Gambar berikut adalah berapa kota/kabupaten penerima DAK yang telah mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya dengan rasio efisiensi.

**Gambar 1.2 Perbandingan Jumlah Kota/Kabupaten dengan Kriteria Efisiensi**



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah.

### **Kinerja Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada Tahun 2017 Ditinjau dari Indikator Efektivitas**

Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan oleh kota/kabupaten penerima DAK dalam mencapai tujuan atau target kebijakan dari suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis data pengukuran efektivitas pada pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di kota/kabupaten penerima DAK tahun 2017 diketahui bahwa secara total pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sudah dilakukan secara efektif. Berbeda dengan dua pengukuran sebelumnya, pada pengukuran efektivitas

ini rasio belum bisa mencapai 100%. Hal ini disebabkan dari target pemerintah untuk melakukan pengadaan 122.706.597 sarana dan prasarana pendidikan pada SD, SMP, SMA dan SMK, yang bisa terealisasi hanya sebesar 120.401.530 atau 98% dari targetnya.

Apabila dilihat dari pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan per satuan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang paling buruk ada pada satuan pendidikan SMK. Berbeda dengan satuan Pendidikan SD, SMP, dan SMA yang telah menerima DAK Fisik Bidang Pendidikan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pengelolaannya atas dana ini menjadi lebih baik.

Kabupaten Keerom di Provinsi Papua menjadi kota/kabupaten dengan kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang paling efektif di Indonesia. Tetapi jika dilihat dari kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Keerom, terdapat satu kegiatan yang belum dilakukan secara efektif. Karena pada penelitian ini yang dihitung adalah tingkat efektivitas pemerintah kota/kabupaten secara keseluruhan maka Kabupaten Keerom tetap dianggap sebagai kota/kabupaten penerima DAK dengan pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang paling efektif.

Kota/kabupaten penerima DAK yang mendapatkan kriteria “Sangat Efektif” berjumlah 128 kota/kabupaten sedangkan kota/kabupaten yang menerima kriteria “Tidak Efektif” berjumlah 121 kota/kabupaten. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di kota/kabupaten tidak dapat dikatakan efektif. Karena presentase kota/kabupaten penerima DAK yang memiliki kriteria “Sangat Efektif” dan kriteria “Tidak Efektif” hampir sama. Dapat dilihat juga, presentase kriteria terbesar ada pada

kriteria “Efektif”, dimana terdapat 133 kota/kabupaten yang menerima kriteria tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan hanya bisa dikatakan cukup efektif. Selain karena presentase jumlah kota/kabupaten yang memiliki kriteria “Sangat Efektif” dan “Tidak Efektif” hampir sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, presentase kota/kabupaten penerima DAK yang memiliki kriteria dibawah “Cukup Efektif” juga tinggi yaitu mencapai 37% dari jumlah totalnya.

#### **Kinerja Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada Tahun 2017 Ditinjau dari Indikator *Cost-Effectiveness***

Pengukuran *cost-effectiveness* bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan oleh kota/kabupaten penerima DAK telah dilakukan secara efisien dan efektif. Berdasarkan hasil analisis data pengukuran *cost-effectiveness* pengelolaan DAK Fisik di Indonesia dapat dikatakan *cost-effective*.

Dari 503 kota/kabupaten penerima DAK, terdapat 261 kota/kabupaten yang tergolong *cost-effective*. Melihat jumlah

kota/kabupaten yang tergolong *cost effective* mencapai 52% dari jumlah total kota/kabupaten penerima DAK yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di kota/kabupaten penerima DAK dapat dikatakan *costeffective*.

Kota/kabupaten paling *cost-effective* dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun 2017 adalah Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Mappi. Kabupaten ini menjadi kota/kabupaten penerima DAK yang paling *cost-effective* karena kedua rasio efisiensi dan rasio efektivitasnya berada diatas 100%.

Apabila diteliti dari satuan pendidikannya, dapat dilihat bahwa hanya satuan pendidikan SMP yang dapat dikatakan *cost-effective* dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan SMP adalah satu-satunya satuan pendidikan yang memiliki rasio efisiensi dan rasio efektivitas diatas kriteria “Efisien” dan “Efektif”.

Terdapat 6 provinsi yang bisa dikatakan *costeffective* dalam pengelolaan

DAK Fisik Bidang Pendidikannya. Ke 6 provinsi tersebut adalah Provinsi Jambi, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ke 6 provinsi ini memiliki rasio efisiensi dengan kriteria “Sangat Efisien” dan rasio efektivitas dengan kriteria “Sangat Efektif” atau “Efektif”.

### **Evaluasi Kinerja Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada Tahun 2017**

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan oleh kota/kabupaten penerima DAK telah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, dan *cost-effective*. Berdasarkan hasil pengukuran 4 indikator *Value for Money* menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Indonesia dapat dikatakan baik. Hal ini dilihat dari hasil pengukuran indikator ekonomi, indikator efisiensi, indikator efektivitas dan indikator *cost effective* yang memiliki hasil yang baik.

Dari 503 kota/kabupaten penerima DAK, terdapat 261 kota/kabupaten yang tergolong berkinerja baik. Melihat jumlah

kota/kabupaten yang hasil pengukuran 4 indikator *Value for Money*nya memiliki hasil yang baik mencapai 52% dari jumlah total kota/kabupaten penerima DAK yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan menurut kota/kabupaten penerima DAK dapat dikatakan baik.

Dilihat dari pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan per kota/kabupaten penerima DAK, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 kota/kabupaten penerima DAK yang dapat dikatakan paling baik kinerjanya dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikannya. Kabupaten ini menjadi kota/kabupaten penerima DAK dengan kinerja yang paling baik dilihat dari hasil pengukuran sebelumnya dimana memiliki hasil indikator efektivitas dan indikator *cost-effectiveness* yang paling baik diantara kota/kabupaten penerima DAK lainnya.

Apabila diteliti dari satuan pendidikannya, dapat dilihat bahwa hanya satuan pendidikan SMP yang dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya pada tahun 2017. Hal ini dilihat dari hasil pengukuran indikator *Value for Money* yang semuanya

menghasilkan hasil yang baik. Satuan pendidikan yang dapat dikatakan berkinerja paling buruk dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya adalah satuan pendidikan SMK. Hal ini disebabkan dalam pengukuran indikator *Value for Money*, satuan Pendidikan SMK hanya memiliki hasil yang bagus pada pengukuran indikator ekonomi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun 2017 ditinjau dari indikator ekonomi termasuk dalam kriteria sangat ekonomis. Hal ini dilihat dari rasio ekonomi yang mencapai 136% dengan capaian *output* mencapai 98%. Selain itu, kota/kabupaten penerima DAK juga sebagian besar memiliki rasio ekonomi dan capaian *output* sebesar 90% keatas Tetapi dilihat dari satuan pendidikannya masih terdapat satuan pendidikan yang tidak ekonomis dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya yaitu satuan pendidikan SMK.

2. Kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun 2017 ditinjau dari indikator efisiensi termasuk dalam kriteria sangat efisien. Hal ini dilihat dari rasio efisiensi yang mencapai 133%. Selain itu, kota/kabupaten penerima DAK sebagian besar berada pada kriteria sangat efisien. Tapi dilihat dari satuan pendidikannya, terdapat satuan pendidikan yang tidak mendapatkan kriteria sangat efisien yaitu satuan pendidikan SMK.
3. Kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun 2017 ditinjau dari indikator efektivitas termasuk dalam kriteria efektif. Hal ini dilihat dari rasio efektivitas yang mencapai 98%. Selain itu, kota/kabupaten penerima DAK sebagian besar termasuk dalam kriteria efektif dan sangat efektif. Dilihat dari satuan pendidikan, hanya satuan Pendidikan SMK yang mendapatkan kriteria tidak efektif.
4. Kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun 2017 secara keseluruhan ditinjau dari indikator *cost-effectiveness* termasuk dalam kriteria *cost-effective*. Hal ini dilihat dari pengukuran indikator efisiensi dan

efektivitas yang memiliki hasil baik. Tetapi dilihat dari satuan pendidikannya, hanya satuan pendidikan SMP yang termasuk dalam kriteria *cost effective*.

5. Evaluasi kinerja pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun 2017 secara keseluruhan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini dilihat dari hasil pengukuran indikator ekonomi, efisiensi, efektivitas dan *cost-effectiveness* yang memiliki hasil baik. Selain itu, sebagian besar kota/kabupaten penerima DAK memiliki kinerja yang baik dalam mengelola DAK Fisik Bidang Pendidikannya. Tetapi dilihat dari satuan pendidikannya, hanya satuan pendidikan SMP yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

### **Saran**

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan agar ikut serta dalam memonitoring dan mengevaluasi

penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

2. Bagi pemerintah kota/kabupaten penerima DAK agar mengawasi dan mengevaluasi penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang dialokasikan kepada setiap satuan pendidikan (terutama satuan Pendidikan selain SMP) yang berada di daerahnya sehingga DAK Fisik Bidang Pendidikan dapat digunakan secara lebih ekonomis, efisien dan efektif oleh satuan pendidikan tersebut.

3. Bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam penentuan *outcome* dapat menggunakan metode lain. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam mengukur kinerja suatu organisasi tidak hanya menggunakan tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tetapi perlu ditambah dengan dua elemen lain. Serta penelitian selanjutnya tidak hanya melihat dari total *input*, *output*, dan *outcome* yang ada di kota/kabupaten tetapi juga melihat per kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2011. *Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Jakarta.
- Bergvall, D., C. Charbit, D.J. Kraan dan O. Merk. 2006. *Intergovernmental Transfers and Decentralised Public Spending*. OECD Journal on Budgeting,5.
- Broadway, Robin dan Shah, Anwar. 2007. *Intergovernmental Fiscal Transfers Principle and Practice. Public Sector Governance and Accountability Series*.New York.
- Falleti, Tulia G. 2005. *A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective*. American Political Science Review. 99:327-346.
- Hasen, Don R. dan Marryane M. Mowen. 2007. *Management Accounting, 8<sup>th</sup> Edition*. Cengage Learning.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics 3: 305-360.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta
- Mifda. (6 Oktober 2011). *Percepatan Pembangunan Dengan Desentralisasi Fiskal*. Kompasiana. Diakses dari <http://birokrasi.kompasiana.com/2011/10/06/percepatan-pembangunandengan-desentralisasi-fiskal-399263.html>.

Morozov, Boris. 2015. *Theory and Practice of Decentralization in Developing Countries: Evidence from Republic of Moldova*. Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019*.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.  
Viyanti dan Se Tin. 2010. *Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Terhadap Prestasi Kerja*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1 (3).